

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.

Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah sebagai Pencegah Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta.

Amir Ilas. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

EQ. RM Surachman, dan Jan S. Maringka, 2017, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pidana, dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ivan Yustiavandana, Et. Al, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Laden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, A. Rahim, dan Januhari Guwi, 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Panggabean P., 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- R. Wiyono, 2014 *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Siagian, Sondang. P., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Shafira Maya, et al. 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual.
- Soejono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sriwidodo Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Sukarno Aburaera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur.

Sutan Remy Sjahdeni, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Y. Wahyu Saronto, 2018, *Inlijen (Teori Intelijen Dan Pembangunan Jaringan)*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta: Rajagrafindo.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.

2. Skripsi

Alif Thaariq Sutrisno, 2021, *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Muhammad Azriel Raditya Ragani, 2022, *Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ridwan Maulana, 2023, *Tinjauan Yuridis Pelaku Pasif Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Mairizon Salfianda Surbakti, et al., 2023, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses*

Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Diktum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Sumatera Utara.

Nanci Mamarimbing, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen, Volume VI Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ook Mufrohim, dan Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan